

ABSTRAKSI

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana peran Serikat Pedagang Kaki Lima Bubutan dalam menghadapi kebijakan penertiban PKL di jalan Semarang yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dan apa implikasi dari resistensi yang dilakukan oleh serikat pedagang kaki lima Bubutan terhadap kebijakan penertiban PKL buku di jalan Semarang. Yang melatar belakangi penelitian ini ialah selama tahun 2008 lalu Pemkot telah melakukan penertiban di beberapa lokasi PKL di Surabaya. Penertiban tersebut tidak memberikan suatu solusi yang tepat atas permasalahan PKL di Surabaya. Ketika Pemkot hendak menertibkan PKL buku di jalan Semarang, mereka mendapat perlawanan dari para PKL buku karena penertiban yang dilakukan Pemkot tidak disertai dengan solusi yang tepat.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti memakai metode penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus yang menekankan pada *multievidence* dari hasil wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumen yang relevan. Analisa data dilakukan dengan pengkategorian dan pengkombinasian bukti dan menetapkan serangkaian keterkaitan timbal-balik mengenai fenomena tersebut.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini ialah Serikat Pedagang Kaki Lima Bubutan cukup berperan dalam menghadapi kebijakan penertiban PKL buku di jalan Semarang. Sebagai kelompok kepentingan, mereka memperjuangkan kepentingan anggotanya agar mendapat tempat relokasi. Resistensi yang dilakukan Serikat Pedagang Kaki Lima Bubutan juga berdampak pada kebijakan yang diambil oleh Pemkot. Akibat dari resistensi itu, waktu penertiban menjadi molor dan PKL buku jalan Semarang mendapat tempat relokasi, yang lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi berjualan yang lama.

Kata kunci : *Kebijakan penertiban PKL, Resistensi, pedagang kaki Lima,*

ABSTRACT

The aim of this research is how the role of Serikat Pedagang Kaki Lima Bubutan dealing with disciplinary policy conducted by Surabaya Government and what are the implications of resistance carried out by this policy. The background in this research is during the past 2008, Surabaya Government already doing the disciplinary policies in several merchant of cloister location in Surabaya. This disciplinary policy does not provide an appropriate solution for the problem of merchant of cloister in Surabaya. When Surabaya government try to disciplinary book merchant of cloister in Jl Semarang, they get resistance from book merchant of cloister because this disciplinary was not accompanied by the appropriate solutions.

To answer these question researchers using qualitative research methods with a strategy that emphasizes case study on the results multievidence-depth interview , participant observation, and relevan documents. Data analysis and categorization is done by combining the evidence and set a series of mutual interconnection of these phenomena.

Conclusions obtained from this research is Serikat Pedagang Kaki Lima Bubutan quite having role in dealing with disciplinary policy for book merchant of cloister in Jl Semarang. As an interest group, they are fighting for the interest of its members in order to get relocation. Resistance performed by Serikat Pedagang Kaki Lima Bubutan also impacted on the policy taken by Surabaya government. Due this resistance, time of disciplinary delayed, and the book merchant of cloister get the relocation, which is located not far from previous location.

Keywords: *disciplinary policy, resistance, interest group, merchant of cloister*